



HEGEMONY OF DUTCH COLONIAL GOVERNMENT AGAINST THE EXISTENCE OF MINANGKABAU ANCIENT MANUSCRIPTS WITH ARABIC-MALAY

HEGEMONI PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA TERHADAP KEBERADAAN NASKAH-NASKAH KUNO MINANGKABAU BERAKSARA ARAB-MELAYU

Yona Primadesi

Fakultas Bahasan dan Seni Universitas Negeri Padang

yonaprima@fbs.unp.ac.id

Abstract

Far before the Netherland colonial came to Indonesia, Indonesian people is a very eductead people. Proves with the development of traditional education that use local font in the whole country, on of them is Minangkabau. Local font of Minangkabau is the adaptation of Arabian font along with the culture of the people there that is brought by the Arabia merchants, and well known with Arab-Melayu font or Arab without marker. Arab-Melayu font is thaught in the traditional Minangkabau education system through mosque. Besides, Arab-Melayu fontis the background of toward the existence of some texts which contains the value of life of Miangkabau people at that time. However, the existence of Arab-Melayu font try to move, especially when the Netherland colonial try to authorize by introducing latin font to Minangkabau people. The hegemony of latin font cause the degradation of Arab-Melayu font, that implicates to the dissapear of some texts like some scripts or memory that is saved in the old Minangkabau people's mind. Other than that, the hegemony of politics that is offered by The Netherland's government caused many Minangkabau scripts become not appropriate to be published and also most of the scripts is voluntary given to the Netherland's government or as a gift.

Key Words: *Minangkabau scripts, The Netherland's colonial, hegemony, local font*

Abstrak

Jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, orang Indonesia adalah orang yang sangat edukatif. Terbukti dengan berkembangnya

pendidikan tradisional yang menggunakan aksara lokal di seluruh negeri, di antaranya adalah Minangkabau. Aksara lokal Minangkabau adalah adaptasi dari aksara Arab bersama dengan budaya orang-orang di sana yang dibawa oleh para pedagang Arabia, dan terkenal dengan aksara Arab-Melayu atau Arab gundul. Aksara Arab-Melayu masuk dalam sistem pendidikan tradisional Minangkabau melalui masjid. Selain itu, aksara Arab-Melayu merupakan latar belakang adanya beberapa teks yang berisi nilai kehidupan orang-orang Minangkabau saat itu. Namun, keberadaan aksara Arab-Melayu mencoba terdesak, terutama saat penjajah Belanda mengenalkan aksara latin kepada masyarakat Minangkabau. Hegemoni aksara latin menyebabkan degradasi aksara Arab-Melayu, yang berimplikasi pada menghilangnya beberapa teks seperti beberapa skrip atau memori yang tersimpan dalam pikiran orang Minangkabau tua. Selain itu, hegemoni politik yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda menyebabkan banyak naskah Minangkabau tidak sesuai untuk diterbitkan dan juga sebagian besar skripnya secara sukarela diberikan kepada pemerintah Belanda atau sebagai hadiah.

Kata kunci: *Skrip Minangkabau, hegemoni kolonial Belanda, aksara lokal*

Pendahuluan

Selama ini terdapat anggapan bahwa sebelum intervensi pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang buta huruf. Jika yang dimaksud adalah buta huruf latin mungkin benar, akan tetapi kalau buta huruf tradisional-lokal, realitas sejarah tidak dapat menerima anggapan tersebut karena masyarakat Indonesia telah memiliki aksara lokal atau aksara daerah. Aksara lokal tersebut telah banyak menghasilkan teks-teks berupa naskah yang berisi nilai kehidupan masyarakat pada saat itu. Selain itu, aksara lokal telah menjadi aksara pengantar dalam sistem pendidikan tradisional masyarakat Indonesia. Salah satunya masyarakat Minangkabau yang menggunakan aksara Arab-Melayu sebagai aksara lokal.

Aksara lokal masyarakat Minangkabau merupakan adaptasi dari aksara Arab dengan kebudayaan masyarakat setempat, yang dibawa oleh pedagang dari bangsa Arab, dan dikenal dengan nama aksara Arab-Melayu atau aksara Arab gundul. Aksara Arab-Melayu diajarkannya dalam sistem pendidikan tradisional Minangkabau melalui surau-surau. Selain itu, aksara Arab-Melayu pun melatarbelakangi lahirnya teks-teks berupa naskah yang berisi nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau pada saat itu.

Teks berisi nilai, pengetahuan, kebiasaan, adat-istiadat, bahasa, kesenian, dan tata cara hidup yang tertuang di dalam tulisan, dalam bentuk naskah, dan tersimpan didalam memori masyarakat, dalam bentuk ingatan dan diturunkan

dari generasi ke generasi. Pada beberapa tempat di Minangkabau atau Sumatera Barat secara umum, dapat ditemukan berita tercetak atau terekam dalam bahasa tulis sebagai peninggalan para leluhur.

Di Sumatera Barat, naskah-naskah itu disimpan di beberapa lembaga formal, lembaga nonformal, dan masyarakat (perorangan dan kelompok). Museum Daerah Provinsi Sumatera Barat, Adityawarman, sebagai lembaga formal, menyimpan sekitar 60 naskah. Berbagai koleksi naskah yang terdapat di museum itu dapat dilihat dalam katalog naskah yang sangat sederhana, yang disusun oleh Museum bekerja sama dengan Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Padang Panjang, juga menyimpan beberapa naskah. Akan tetapi, naskah-naskah tersebut merupakan kopian dari naskah-naskah koleksi PNRI, Jakarta. Di samping itu, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, juga menyimpan sekitar 25 naskah; dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Padang, juga menyimpan beberapa naskah (Suryadi, 2007).

Surau yang dapat disebut sebagai satu lembaga nonformal (di Minangkabau) merupakan tempat yang paling banyak menyimpan naskah. Hampir di setiap surau di Minangkabau ini, terutama surau yang menjadi pusat pendidikan agama (tarekat) memiliki dan menyimpan naskah, seperti Surau Paseban, Koto Tangah, Padang; Surau Batang Kabung, Koto Tangah, Padang; Surau Parak Pisang, Sumani, Solok; Surau Tandikek dan Ampalu, Padang Pariaman; dan Surau Batu Ampa dan Taram, Payakumbuh.

Naskah-naskah yang masih disimpan oleh masyarakat, baik dari kelompok keluarga umum, maupun dari kelompok keluarga 'kerajaan', disimpan oleh pewarisnya dan dapat ditemukan, misalnya di Palembang, Matur, Pariaman, Payakumbuh, Solok, dan Kabupaten Agam. Begitu juga, keluarga kerajaan, seperti Keluarga Raja Istana Pagaruyung di Batusangkar, Keluarga Raja 'Istana' Mandeh Rubiah di Lunang, Pesisir Selatan, Keluarga Raja Kerajaan Inderapura juga di Pesisir Selatan, dan Keluarga Raja Kerajaan Balun di Sungai Pagu, Solok Selatan, tercatat sebagai pewaris yang masih menyimpan berbagai naskah di rumah keluarga masing-masing (Suryadi, 2007). Keberadaan naskah-naskah Minangkabau di luar tempat asalnya itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penjajahan dan perdagangan naskah.

Jika menilik kepada jejak sejarah, banyak hal yang menyebabkan kaburnya keberadaan naskah-naskah Minangkabau beraksara Arab-Melayu tersebut, diantaranya keberadaan aksara Arab-Melayu mulai mengalami pergeseran, terutama ketika pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan hegemoni dengan memperkenalkan aksara latin pada masyarakat Minangkabau. Hegemoni

aksara latin tersebut menyebabkan mulai memudar dan hilangnya budaya aksara Arab-Melayu, yang berakibat hilangnya teks-teks baik berupa naskah maupun ingatan yang tersimpan dalam memori generasi tua Minangkabau. Selain itu, hegemoni politik yang ditawarkan pemerintah Belanda, menyebabkan banyak naskah-naskah Minangkabau yang diserahkan kepada pemerintah Belanda baik sebagai hadiah maupun hibah, ataupun naskah-naskah dengan bahasa arab-melayu yang dianggap “cabul” dan tidak layak untuk di publikasikan, sehingga terlantar begitu saja.

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Tulisan ini merupakan wacana dan pemikiran penulis yang sangat bersifat subyektif tentang pengaruh hegemoni kolonial Belanda terhadap keberadaan naskah-naskah kuno Minangkabau.

Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari istilah yunani, *hegeisthai*. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah).

Hegemoni bisa didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).

***Hegemony** is the dominance of one group over other groups, with or without the threat of force, to the extent that, for instance, the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage; more broadly, cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. Hegemony controls the ways that ideas become “naturalized” in a process that informs notions of common sense (<http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony>)*

“...Dominant groups in society, including fundamentally but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the ‘spontaneous consent’ of subordinate groups, including the working class, through the negotiated construction of a political and

ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups."

Dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan (*the ruling party*, kelompok yang berkuasa). Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan.

Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. Hegemoni bisa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Simon, "...the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later." (Simon, 1982: 23).

Jika dilihat sebagai strategi, maka konsep hegemoni bukanlah strategi eksklusif milik penguasa. Maksudnya, kelompok manapun bisa menerapkan konsep hegemoni dan menjadi penguasa. Sebagai contoh kekuasaan dolar amerika terhadap ekonomi global yang menyebabkan kebanyakan transaksi internasional dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Menurut Gramsci, hegemoni dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Antonio Gramsci lahir pada tanggal 22 januari 1891, di Ales, sardinia, dan meninggal di Roma, 27 April 1973. Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memperoleh beasiswa di Universitas Turin, tahun 1911. Tahun-tahun pertama di universitas merupakan masa di mana Gramsci mempelajari pemikiran filosof idealis Croce.

Sejak dibangku kuliah Gramsci juga banyak tertarik pada *social movement* dan Gramsci sangat terkesan dengan pergerakan buruh dan mendorong dia untuk masuk pada Partai Sosialis Italia (PSI). Ia mulai menjalani kehidupan sebagai seorang aktifis dengan bekerja pada koran sosialis. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1919 Gramsci memimpin pada koran *ordiene nuovo sutu* terbitan kaum sosialis. Tahun 1922, terjadi perubahan perjalanan dalam kehidupan Gramsci sebagai seorang aktivis, ia pindah ke Rusia dan bekerja sebagai *Comintern* di Moskow dan Wina hingga tahun 1924. Tahun 1926 merupakan tahun paling menyedihkan dalam perjalanan kehidupan Gramsci

sebagai aktivis, tetapi pada tahun tersebut merupakan awal tahun yang membuat Gramsci menjadi filsuf.

Konsep hegemoni menjadi terkenal setelah digunakan sebagai penyebutan atas pemikiran Gramsci yang dipahami sebagai ide yang mendukung kekuasaan *kelompok sosial tertentu*. Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci merupakan pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi masyarakat dominan. Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa .

Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. *Kedua*, Masyarakat kelas dominan merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk merekrut kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni.

John Storey menjelaskan konsep hegemoni untuk mengacu kepada proses sebagai berikut:

Sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan "kepemimpinan" moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan

ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.

Karya Gramsci tentang hegemoni termuat dalam buku *The Prison Notebooks*, yang ia tulis ketika berada di dalam penjara. Dalam buku tersebut Gramsci mengacu pada hegemoni untuk menggambarkan aktivitas kelompok yang sedang dominan maupun kekuatan-kekuatan progresif. Bagi Gramsci, apa pun kelompok sosialnya, kita dapat melihat bahwa terdapat tahapan perkembangan bersama tertentu yang harus mereka lalui sebelum mereka dapat menjadi hegemonik. Mengambil dari Marx, persyaratan pertama adalah ekonomi, bahwa kekuatan material telah cukup dikembangkan sehingga orang-orang di dalamnya mampu memecahkan problem-problem sosial yang paling mendesak.

Gramsci kemudian menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan politik yang harus dilalui suatu kelompok sosial agar dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan.

Pertama, dikenal dengan istilah *korporat-ekonomis*. Seorang korporatis merupakan individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Seseorang berafiliasi dengan tahap korporat-ekonomis sebagai fungsi dari kepentingan pribadinya, menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. Pada tahapan ini kelompok yang bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya.

Kedua, anggota-anggota kelompok mulai menyadari bahwa terdapat wilayah kepentingan yang lebih luas dan bahwa terdapat orang lain yang berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa depan yang terjangkau. Dalam tahap inilah rasa solidaritas berkembang, tapi solidaritas ini masihlah hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama. Tidak terdapat pandangan dunia bersama atau apa pun semacam itu. Solidaritas seperti ini dapat mengarah pada upaya-upaya untuk menggalakkan reformasi-reformasi di bidang hukum untuk memperbaiki posisi kelompok tersebut dalam sistem yang ada, tapi belum ada kesadaran tentang bagaimana mereka, dan yang lainnya, dapat diuntungkan oleh pembentukan sistem yang baru.

Ketiga, anggota-anggota kelompok sosial mulai menyadari kepentingan dan kebutuhan untuk menjangkau melampaui apa yang dapat mereka lakukan dalam konteks kelas-kelas mereka masing-masing. Yang dibutuhkan adalah agar

kepentingan mereka turut diusung oleh kelompok-kelompok lainnya yang ter subordinasi seperti halnya mereka.

Gramsci memahami bahwa dalam konteks historis, berjalannya suatu kelompok sosial dari reformisme atas kepentingan pribadi menuju hegemoni nasional dapat terjadi secara efektif melalui partai politik. Dalam formulasi yang kompleks ini, beragam ideologi kelompok-kelompok yang beraliansi akan berkumpul. Tak dielakkan lagi akan terjadi konflik antara ideologi-ideologi ini, dan melalui proses perdebatan dan pertarungan, satu ideologi, atau kombinasi penyatuan darinya, akan muncul mewakili kelas-kelas yang beraliansi.

Ideologi ini dapat dibilang hegemonik, kelompok yang mewakilinya telah meraih posisi hegemonik atas kelompok-kelompok yang ter subordinasi. Dalam tahap ini, partai mencapai kedewasaan dengan meraih kesatuan antara tujuan ekonomi dan politik maupun kesatuan moral dan intelektual - dapat dikatakan sebagai saling berbagi suatu pandangan dunia.

Dengan persatuan ini di belakangnya, partai mentransformasi masyarakat untuk meletakkan persyaratan bagi ekspansi kelompok hegemonik. Negara menjadi mekanisme untuk melakukan ini, kebijakan dihasilkan dan ditegakkan untuk memungkinkan kelompok hegemonik mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan menciptakan simetri antara tujuannya dan tujuan kelompok-kelompok lainnya.

Meskipun tujuan-tujuan ini diformulasikan dengan pemikiran untuk memajukan kepentingan satu kelompok, akan tetapi tujuan-tujuan tersebut harus dialami oleh penduduk sebagai bentuk kepentingan semua orang. Agar ini berjalan efektif, kelompok hegemonik harus memiliki suatu bentuk tertentu dalam menangani kepentingan kelas-kelas yang ter subordinasi.

Hegemoni Kolonial Belanda terhadap Keberadaan Naskah-Naskah Minangkabau Beraksara Arab-Melayu

Masyarakat Minangkabau tidak memiliki aksara asli Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mengadopsi aksara Arab yang di bawa oleh pedagang Arab untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Aksara ini kemudian lebih dikenal dengan nama aksara Arab-Melayu atau Aksara Arab Gundul.

Dalam perkembangan kebudayaan Minangkabau, aksara Arab-Melayu ini kemudian menjadi satu-satunya aksara yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam perkembangan budaya tulis di hampir seluruh aspek kehidupan, seperti perdagangan, pendidikan, dan agama. Aksara Arab-Melayu mulai diajarkan

disurau-surau sebagai pusat pendidikan pada masa itu. Aksara Arab-Melayu kemudian berkembang menjadi aksara dalam sejarah penulisan di Minangkabau.

Aksara dalam komunitas etnik Minangkabau tidak sekadar materi huruf. Di dalam aksara tersebut (aksara Arab-Melayu) terkandung sejarah, legenda, mitos, filsafat, sastra, estetika-kaligrafi, teologi, dan simbol. Aksara juga menunjukkan otoritas kekuasaan, intelektualitas, keagamaan, dan kultural. Aksara menjadi juru bicara dari tipologi kultural suatu komunitas etnik. Aksara sama dengan identitas. Akan tetapi kisah aksara ini telah ditepikan dan dilenyapkan oleh masyarakat pengguna aksara itu sendiri.

Ranah kekuasaan pun dianggap sebagai pihak luar yang bersalah terhadap hilangnya aksara Arab-Melayu tersebut. Berbagai sumber sejarah mencatat, aksara Arab-Melayu telah umum digunakan dalam lembaga pendidikan non-formal di Minangkabau, seperti Surau, sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran ilmu agama. Selain itu, untuk menunjang fungsi surau sebagai *Kriptorium*, transliterasi naskah-naskah yang berisi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai hidup tersebut pun menggunakan aksara Arab-Melayu.

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat perkembangan aksara Arab-Melayu sebagai aksara lokal masyarakat Minangkabau adalah melalui sejarah panjang penerbitan di Minangkabau. Sujatmoko mengemukakan bahwa jauh sebelum kolonial Belanda masuk wilayah Minangkabau (Sumatera Barat minus Mentawai), masyarakat Minangkabau telah mengenal usaha penerbitan lokal, yang terdapat dimasing-masing *nagari* di Minangkabau. Terbitan yang dikenal pada masa itu, menyerupai surat kabar pada masa sekarang. Terbitan yang beradar disetiap *kenagarian* Minangkabau bercerita tentang *urang nagari* dan nilai-nilai kehidupan pada *kenagarian* tersebut. Terbitan tersebut menggunakan bahasa Minangkabau dengan aksara Arab-Melayu. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau telah mengenal aksara dalam budaya tulis dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi ini berubah saat kolonial "memaksa" penggunaan aksara Latin dalam korespondensi demi kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam memahami dan mempelajari aksara-aksara etnik, dan pemerintah Belanda merasa perlu menantang dominasi pengaruh penggunaan aksara Arab-Melayu dalam praktek politik, pendidikan, hukum, dan pola sebaran agama. Aksara Latin pun dimunculkan untuk menciptakan hegemoni para penguasa. Aksara Latin menjelma menjadi medium penjinakan, meski ada embel-embel untuk pemberadaban.

Pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris menjadi pelaku untuk merayakan aksara Latin di Nusantara. Konon, masa pemerintahan singkat oleh Inggris pada abad XIX malah ikut "merestui" sebaran aksara Latin. Mereka memaksakan diri agar segala bentuk edaran produksi pemerintah memakai aksara Latin, sehingga penguasa lokal pun harus menurut untuk berpartisipasi dalam lingkaran kekuasaan mereka. Aksara Latin juga eksplisit dijadikan penantang agar pengaruh pemakaian aksara Arab, pengaruh masa Islam, tidak memberi identitas bagi masyarakat. Pertarungan aksara terjadi, tapi takdir kekalahan mesti kita terima.

Dalam bukunya yang berjudul *the prison of Notebook* Gramsci menyatakan bahwa dalam pembentukan hegemoni dalam kelompok masyarakat, melalui tiga tahap. pertama dikenal dengan istilah *kooprat- ekonomis*. Pada tataran ini, masyarakat merupakan individu yang bersifat independent, tanpa terikat oleh kelompok manapun. Individu perlu melakukan tindakan-tindakan yang melanggengkan keberadaannya sebagai seorang individu dalam masyarakat.

Pemerintah kolonial membawa dan memperkenalkan aksara latin pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melanggengkan dan mempertegas kedudukan bahwa bangsa kolonial merupakan bangsa yang mendominasi. Aksara latin digunakan dalam pengumuman-pengumuman pemerintahan. Selain itu, aksara latin dijadikan sebagai standar dalam kegiatan administratif sosial, politik, ekonomi dan budaya kolonial, sehingga masyarakat yang tidak menguasai aksara latin akan merasa terkucilkan.

Untuk menunjukkan keberadaan dan kedudukan individu tersebut dalam masyarakat, serta untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, individu tersebut merasa perlu untuk ambil bagian dalam pengenalan aksara latin tersebut. Individu kemudian mulai mengenal dan belajar tentang aksara latin.

Seiring perkembangannya, dalam diri individu akan timbul perasaan bahwa aksara latin itu penting, karena dengan aksara latin berbagai kepentingan mudah untuk didapat dan diperoleh. Masyarakat tersbut akan merasa lebih mudah untuk mendapatkan informasi, merasa lebih diterima dalam pergaulan sosial masyarakat, memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dan status sosial ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda pun memberikan persepsi bahwa masyarakat yang tidak mampu menggunakan aksara latin, merupakan masyarakat yang terbelakang. Sehingga mau tidak mau masyarakat akan mempelajari aksara latin tersebut dan mulai menyinggalkan aksara lokal mereka.

Abad ke-16 hingga abad ke-20 merupakan zaman gemilang untuk dominasi aksara Latin. Pendirian lembaga pendidikan, kerja birokrasi kolonial, dan revolusi

mesin cetak identik dengan rezim aksara Latin. Aksara ini memang memberi pengaruh laju modernitas dan menyadarkan kalangan pribumi atas sejarah kekalahan.

Dalam tataran terakhir hegemoni aksara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tanpa disadari aksara latin menjadi aksara utama dalam perkembangan budaya tulis masyarakat dan mulai mengabaikan aksara lokal. Akan tetapi, aksara Latin sebagai simbol penjinakan juga dijadikan senjata perlawanan oleh kita, melalui pemakaian dalam tulisan-tulisan menantang ulah kolonial. Kaum intelektual, pergerakan, wartawan, dan pujangga kita memakai aksara Latin, tapi menaruh spirit resistensi agar tak kalah telak.

Legitimasi aksara Latin kentara dalam garapan tata bahasa Melayu (1901) oleh CA. van Ophuijsen. Pembakuan aksara-aksara lokal, terutama aksara Melayu dilakukan melalui ejaan-ejaan memakai aksara Latin. Inilah kekalahan sistematis, karena pembakuan tersebut dijadikan standar dalam pengajaran di Hindia Belanda. Efek rezim aksara Latin ini adalah, nalar, imajinasi, perasaan, atau mimpi kita "terbentuk" dalam dunia asing, tapi dipaksakan untuk dipribumikan melalui perangkat politik, hukum, sastra, atau pendidikan.

Pergeseran paradigm dari aksara Arab-Melayu ke aksara latin ini mengakibatkan terancamnya keberadaan teks-teks Minangkabau yang pada umumnya menggunakan aksara Arab-Melayu. Masyarakat telah sampai pada kondisi yang menganggap bahwa aksara Arab-Melayu merupakan aksara kelas kedua sehingga semua naskah yang menggunakan aksara Arab-Melayu bisa dikatakan tidak begitu penting lagi bagi masyarakat. Padahal, kearifan lokal, nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial-budaya masyarakat banyak tersimpan didalam naskah-naskah tersebut.

Selain itu, kebijakan dan dominasi politik kolonial Belanda meninggalkan jejak yang buruk bagi keberadaan naskah-naskah Minangkabau. Hal tersebut bisa dilihat dari minimnya jumlah naskah Minangkabau yang masih tersimpan diwilayah Minangkabau. Tidak sedikit naskah-naskah Minangkabau yang berada di negeri Belanda, terutama di Leiden University. Naskah-naskah tersebut berpindah tangan dari masyarakat lokal menjadi milik pemerintah Kolonial Belanda, sebagian besar sebagai bentuk penghargaan masyarakat lokal terhadap pemerintah Belanda. Naskah-naskah tersebut diberikan sebagai hadiah dan upeti kepada pemerintah Belanda.

Simpulan

Aksara lokal masyarakat Minangkabau merupakan adaptasi dari aksara Arab dengan kebudayaan masyarakat setempat, yang dibawa oleh pedagang dari

bangsa Arab, dan dikenal dengan nama aksara Arab-Melayu atau aksara Arab gundul. Aksara Arab-Melayu diajarkannya dalam sistem pendidikan tradisional Minangkabau melalui surau-surau. Selain itu, aksara Arab-Melayu pun melatarbelakangi lahirnya teks-teks berupa naskah yang berisi nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau pada saat itu. Namun demikian, keberadaan aksara Arab-Melayu mengalami pergeseran, terutama ketika pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan hegemoni dengan memperkenalkan aksara latin pada masyarakat Minangkabau.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Menurut Gramsci, hegemoni dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Tradisi penggunaan aksara Arab-Melayu berubah saat kolonial "memaksa" penggunaan aksara Latin dalam korespondensi demi kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam memahami dan mempelajari aksara-aksara etnik, dan pemerintah Belanda merasa perlu menantang dominasi pengaruh penggunaan aksara Arab-Melayu dalam praktek politik, pendidikan, hukum, dan pola sebaran agama. Aksara Latin pun dimunculkan untuk menciptakan hegemoni para penguasa. Aksara Latin menjelma menjadi medium penjinakan, meski ada embel-embel untuk pemberadaban. Pemerintah kolonial Belanda memaksakan diri agar segala bentuk edaran produksi pemerintah memakai aksara Latin, sehingga penguasa lokal pun harus menurut untuk berpartisipasi dalam lingkaran kekuasaan mereka. Aksara Latin juga eksplisit dijadikan penantang agar pengaruh pemakaian aksara Arab, pengaruh masa Islam, tidak memberi identitas bagi masyarakat. Pertarungan aksara terjadi, tapi takdir kekalahan mesti kita terima.

Pemerintah kolonial membawa dan memperkenalkan aksara latin pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melanggengkan dan mempertegas kedudukan bahwa bangsa kolonial merupakan bangsa yang mendominasi. Aksara latin digunakan dalam pengumuman-pengumuman pemerintahan. Selain itu, aksara latin dijadikan sebagai standar dalam kegiatan administratif sosial, politik, ekonomi dan budaya kolonial, sehingga masyarakat yang tidak menguasai aksara latin akan merasa terkucilkan.

Pergeseran paradigm dari aksara Arab-Melayu ke aksara latin ini mengakibatkan terancamnya keberadaan teks-teks Minangkabau yang pada umumnya menggunakan aksara Arab-Melayu. Masyarakat telah sampai pada kondisi yang menganggap bahwa aksara Arab-Melayu merupakan aksara kelas

kedua sehingga semua naskah yang menggunakan aksara Arab-Melayu bisa dikatakan tidak begitu penting lagi bagi masyarakat. Padahal, kearifan lokal, nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial-budaya masyarakat banyak tersimpan didalam naskah-naskah tersebut.

Selain itu, kebijakan dan dominasi politik kolonial Belanda meninggalkan jejak yang buruk bagi keberadaan naskah-naskah Minangkabau. Hal tersebut bisa dilihat dari minimnya jumlah naskah Minangkabau yang masih tersimpan diwilayah Minangkabau. Tidak sedikit naskah-naskah Minangkabau yang berada di negeri Belanda, terutama di Leiden University. Naskah-naskah tersebut berpindah tangan dari masyarakat lokal menjadi milik pemerintah Kolonial Belanda, sebagian besar sebagai bentuk penghargaan masyarakat lokal terhadap pemerintah Belanda. Naskah-naskah tersebut diberikan sebagai hadiah dan upeti kepada pemerintah Belanda.

Rujukan

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1980). *Pemeliharaan dan Penjagaan Arsip*. Jakarta
- Apostel, R. and Raymond, B. (1997). *Librarianship and the Information Paradigm*. London: The Scarecrow Press.
- Buckland, M. (2001). *Redesigning Library Services: A Manifesto*. New York: American Library Association.
- Boothman, D. (2008). *Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci's Concept of Hegemony*. London: Routledge.
- Bocock, R. (2005). *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid. 3. (1989). Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Hardjoprakoso, M. (1997). "Buku dan Perpustakaan". Di dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa : Bunga rampai sekitar Perbukuan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Howson, R. (2006). *Challenging Hegemonic Masculinity*. London: Routledge.
- Howson, R. & Smith, K. (2008). *Hegemony: Studies in Consensus and Coercion*. London: Routledge.
- Kasbolah, K. (1992). "Studi Kepustakaan" di dalam *Forum Penelitian*, 4(1&2).

- Magnis-Suseno, F. (1997). "Memanusiakan Buku – Membukukan Manusia". Di dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa : Bunga rampai sekitar Perbukuan di Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta
- Martin, W. J. (2003). *Global Information Society*. London: Aslib Gower.
- Martono, B. (1994). Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam Manajemen Kearsipan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Purwono, (2004). Buku Dan Perpustakaan : Catatan Memori Bangsa Pembangkit Nasionalisme.
- Rowley, J. (1996). *Organizing of Knowledge*. London: Library Association.
- Simon, R. (1991). *Gramsci's Political Thought: An introduction*. Lawrence and Wishart: London.
- Strinati, D. (1995). *An Introduction to Theories of Popular Culture*. Routledge: London.
- Somadikarta, L. K. (1998). "Perkembangan dalam pengelolaan informasi", di dalam *Analisis Kebudayaan*.
- Sudarsono, B. (2006). *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Editor Joko Santoso. Jakarta: PP IPI.
- Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyo-Basuki. (2000). "Potensi Perpustakaan dalam Menghadapi Krisis Sosial Budaya"
- Suryadi. (2007). Yang Tersisa Dan Masih Bertahan Dari Tradisi Pernaskhahan Minangkabau. Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Wursanto, Ig. (1990). Kearsipan 1. Yogyakarta : Kanisius